

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi tentang Perencanaan Pembangunan Melalui Program Satu Milyar Satu Kecamatan
(SAMISAKE) di Kota Jambi)

Rizalul Fikri, Ratih Nurpratiwi, Choirul Saleh

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

email; r_fikri@gmail.com

Abstract: *Poverty is a problem that requires countermeasures and systematic approach, integrated and comprehensive to meet the load and meet the basic rights of citizens through the development of an inclusive, equitable and sustainable to achieve a dignified life. To answer the problems of poverty, the Provincial Government Jambi produce a poverty reduction program Satu Milyar satu Kecamatan (SAMISAKE). The program took the form of assistance provided directly from the Government to the public in the form of surgical house, capital assistance, scholarships schools etc. The study is based on the findings of this thesis are: 1) planning is in conformity with the legislation just takes more effort to produce careful planning. It takes the involvement of all stakeholders in the planning process. If seen from the amount of the budget compared with the area, the amount of the budget it is still lacking; 2) Determination of target beneficiaries have been set in legislation, but the lack of data that is valid and up to date lead to less targeted recipients; 3) Should the excess of the underlying implementation of the law, should be able to be supported by the implementation of good management as well. Involving all levels of government in the region is also very important to be able to minimize the obstacles that occur in the field.*

Keywords: *Samisake Program, Regional Planning, Poverty Reduction*

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang membutuhkan penanggulangan dan pendekatan sistematis, terpadu dan komprehensif untuk memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pengembangan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Untuk menjawab masalah kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jambi menghasilkan program penanggulangan kemiskinan Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Program ini berupa bantuan yang diberikan langsung dari Pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk bedah rumah, bantuan modal, beasiswa sekolah dll Penelitian ini didasarkan pada temuan tesis ini adalah: 1) perencanaan sudah sesuai dengan undang-undang hanya membutuhkan lebih banyak usaha untuk menghasilkan perencanaan yang matang. Dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Jika dilihat dari jumlah anggaran dibandingkan dengan daerah, jumlah anggaran itu masih kurang; 2) Penetapan sasaran penerima telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi kurangnya data yang valid dan up to date menyebabkan penerima kurang ditargetkan; 3) Apabila kelebihan pelaksanaan yang mendasari hukum, harus dapat

didukung oleh penerapan manajemen yang baik juga. Melibatkan semua tingkat pemerintahan di wilayah ini juga sangat penting untuk dapat meminimalkan kendala yang terjadi di lapangan. Kata kunci: Samisake Program, Perencanaan, Penanggulangan Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang selama ini di hadapi oleh berbagai negara dari masa ke masa. Termasuk Indonesia kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di Indonesia. Berbagai kebijakan dan upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi jumlah penduduk miskin masih tetap besar. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah selama ini belum maksimal dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Menghadapi permasalahan tentang kemiskinan di Indonesia dewasa ini terdapat perkembangan pemikiran yang menarik yaitu dimana pihak pemerintah dan seluruh bangsa sudah tidak lagi menganggap tabu membahas permasalahan yang dimaksud secara terbuka. Sementara itu, berbagai studi tentang masalah kemiskinan menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak saja mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi sosial, budaya, dimensi struktural atau politik, yang menyebabkan masalah kemiskinan itu menjadi kompleks dan rumit. Realitas kemiskinan kemudian timbul menjadi *human problem* yang telah mengusik dan menguras tenaga serta pikiran banyak orang.

Sampai saat ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang kompleks dan multidimensional. Sulitnya memecahkan persoalan kemiskinan dikarenakan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait berbagai dimensi baik menyangkut dimensi social, dimensi budaya bahkan dimensi struktural. Persoalan kemiskinan lebih di tekankan pada masalah kualitas hidup dan distribusi pendapatan. Kemiskinan menjadi satu rangkaian permasalahan sosial melengkapi permasalahan social lainnya antara lain pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketidakberdayaan, yang ditandai dengan standar hidup yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang masih tinggi, usia harapan hidup yang rendah, pendapatan perkapita yang masih kecil dan lain-lain. (Todaro 2004 : 26)

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan penanganan dan komprehensif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk memenuhi beban dan

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Sebagai salah satu wilayah di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskianannya masih cukup besar. Provinsi Jambi masih merupakan salah satu provinsi yang masih banyak menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi, seperti tingginya jumlah penduduk miskin. angka kemiskinan di Provinsi Jambi khususnya di wilayah Kota mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimulai tahun 2007 hingga tahun 2012, angka kemiskinan di wilayah kota terus mengalami penurunan. Namun kondisi serupa tidak dijumpai di wilayah desa dimana dari tahun 2007 hingga tahun 2013 jumlah penduduk miskin cenderung meningkat. Data tersebut memunculkan bahwa selama 5 (lima) tahun kebelakang terjadi ketimpangan antara masyarakat di Kota dan masyarakat di desa. Padahal, Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang intens dan fokus menerapkan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menandakan angka kemiskinan di provinsi Jambi yang terjadi ketimpangan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum sepenuhnya tepat pada sasaran yang dituju. Hal ini menunjukkan program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah diupayakan oleh pemerintah Provinsi belum optimal dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan kemiskinan tersebut serta belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu mencanangkan program SAMISAKE. Program SAMISAKE adalah program inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi melalui pengalokasian dana sebesar 1 Miliar Rupiah di setiap Kecamatan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara umum, tujuan dari Program SAMISAKE adalah menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk mendukung terwujudnya JAMBI EMAS 2015. Adapun program SAMISAKE yang diatur dalam petunjuk teknis program SAMISAKE terdiri dari; (1) Bedah rumah, (2) Beasiswa, (3) Bantuan modal, (4) Pengadaan alat mesin pertanian, (5) sambungan listrik, (6) Pengadaan kendaraan roda tiga. Dengan program-program tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Tujuan samisake tersebut menghasilkan pertanyaan baru dimana program yang baik dan disertai dengan anggaran yang mencukupi apakah penetapan sasaran calon penerima bantuan sudah tepat? Pemerintah Provinsi Jambi dan khususnya Pemerintah Kota Jambi mendapatkan tantangan baru yaitu dalam penentuan sasaran calon penerima bantuan

Samisake. Penetapan penerima sasaran samisake harus tepat sasaran dan tepat fungsi, jika tidak maka dapat dipastikan program Samisake yang memiliki tujuan yang baik tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Pembangunan dan Administrasi Publik

Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2005:4). Administrasi biasanya ditafsirkan sebagai seni “membereskan segala sesuatunya”. Tekanan diletakkan pada proses-proses serta metoda-metoda untuk menjamin adanya tindakan-tindakan yang tepat. Prinsip-prinsip disajikan untuk mendapatkan tindakan-tindakan berencana dari kelompok orang-orang. Menurut Islamy (2003:2) mengatakan bahwa kata *administration* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ad + ministrare* dalam bahasa Latin yang mempunyai arti “to serve” – memberikan jasa, pelayanan, bantuan melayani atau mengabdikan. Karakteristik utama administrasi adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Siagian (1978:2) menjelaskan pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan administrasi public memiliki pengertian menurut Islamy (2003:5) adalah merupakan suatu bentuk aksi dari pemerintahan, atau merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah.

Perencanaan Pembangunan

Suatu organisasi perlu membuat perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan, sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan dilakukan karena adanya

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan. Kartasmita (1997) menyatakan pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang di arahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Menurut Siagian (1994:108) “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kunarjo (2002:14) bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang di arahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Berdasarkan kutipan Conyers & Hill dalam Arsyad (2004) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan terhadap berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam, modal dan sumberdaya manusia membutuhkan perencanaan yang baik sehingga nantinya dapat dikelola secara baik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Maka dibutuhkanlah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan daerah mengingat telah digulirkannya desentralisasi dan otonomi daerah dengan munculnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan daerah, menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) perlu dipahami terlebih dahulu makna perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan

pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:2) menyatakan “pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.”

Kemiskinan

Quibria (1993:7) mengemukakan batasan pengertian kemiskinan, sebagai berikut : *“Even if one were to agree that minimum amount of food, clothing, and shelter needed to sustain life constitute a universal set of norm, this minima are neither unambiguously defined nor easily quantified”*. Kemiskinan lebih ditekankan pada sebagai kondisi miskin individu yang membedakan dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya. Lalu, pendapat yang berbeda di kemukakan oleh Soemardjan (Tulung dkk, 2008:28) sudut pandang kemiskinan sudah mencakup diluar kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya yang di sebut sebagai kemiskinan struktural, menurutnya kemiskinan struktural adalah: “Kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia buat mereka”.

Metode Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara empiris yang terjadi di lapangan atau obyek penelitian. Metode ini dianggap relevan digunakan terlebih pada dasarnya dalam rangka memenuhi dari permasalahan dan tujuan yang diangkat melalui

penelitian ini. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan, menganalisa dan mengungkapkan makna dari suatu kejadian yang ada di lokasi penelitian.

Pada penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisa data kualitatif dari Ian Dey (1993). Menurut Ian Dey (1993) supayadata bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau struktur), kemudian menggabungkannya kembali untuk memperoleh pemahaman yang baru. Metode ini menganalisis data dengan menggambarkan fenomena-fenomena, mengelompokkannya dalam beberapa konsep dan kemudian melihat hubungan dari konsep-konsep tersebut terinterkoneksi.

Hasil Pembahasan

Sumber daya alam Provinsi Jambi yang berlimpah dan posisi geografis yang strategis merupakan salah satu modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Akan tetapi, hingga saat ini potensi Sumber Daya Alam yang besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Untuk mengurangi pertumbuhan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan maupun di Perkotaan, maka pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan Program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan peningkatan kualitas hidup MBR diseluruh Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Dengan membangun Kecamatan berbasis desa dan Kelurahan maka pemerataan pembangunan akan lebih dirasakan. Dari sinilah lahir istilah Samisake, Dengan demikian Samisake merupakan Program Pembangunan yang bersifat *bottom up*, artinya wujud program ini adalah aspirasi yang berasal dari bawah (masyarakat) dimana setiap kecamatan diberi kebebasan untuk mengajukan aspirasi kebutuhan bagi masyarakat di wilayahnya.

Program Samisake diharapkan dapat merespon kondisi riil di lapangan yang masih terdapat banyak rakyat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni atau kurang sehat, kesulitan membiayai pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang masih rendah disebabkan kurangnya modal. Kegiatan utama dari Program Samisake adalah bedah rumah keluarga miskin menjadi layak huni. Selain bedah rumah, program ini mencakup

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

pemberian sertifikat gratis, pemberian beasiswa pendidikan mulai jenjang tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, penguatan modal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), bantuan alat mesin pertanian dan kendaraan roda tiga untuk angkutan sampah di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, program Jamkesmasdapro (Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi), pelatihan tenaga kerja, serta bantuan honorarium bagi 356 petugas PPL (petugas penyuluh lapangan).

Jika mengacu pada sasaran atau objek Program SAMISAKE di Kota Jambi dapat dilihat jelas melalui Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015. Pada tahap sasaran program SAMISAKE BAB II Pasal 3 pada ayat 1 menyebutkan bahwa sasaran yang menerima program SAMISAKE ialah kepala keluarga sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Tahun 2011 merupakan sasaran penerima Program SAMISAKE. Peraturan yang mengatur penerima bantuan tersebut berlaku diseluruh wilayah kabupaten/kota seluruh Provinsi Jambi termasuk juga Kota Jambi. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Jambi yang melaksanakan amanat program samisake dari Pemerintah Provinsi. Di dalam pelaksanaannya, penetapan penerima bantuan tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Provinsi saja melainkan juga mengikutsertakan pemerintah kabupaten/kota hingga desa untuk berkontribusi.

Selain daftar penerima bantuan berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi, jika dilapangan ditemukan kepala keluarga miskin yang belum terdaftar dalam program SAMISAKE di Kota Jambi dapat diusulkan kembali berdasarkan PPLS 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dengan melampirkan data yang dibutuhkan dari pihak kecamatan. Intinya, mengenai sasaran obyek dari kegiatan Program SAMISAKE menurut Pergub pasal 3 ayat 4 bahwasanya bantuan program SAMISAKE diberikan kepada kepala keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis. Petunjuk teknis disini dapat dijabarkan melalui bentuk kegiatan, proses pengalokasian dana kegiatan dan implementor yang terlibat dalam kegiatan program

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

SAMISAKE di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran penentuan sasaran atau objek dari penerima program Samisake:



Gambar. Penetapan sasaran atau objek dari program SAMISAKE di Kota Jambi

Pola tersebut sangat baik dan ideal, akan tetapi didalam penerapannya pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan kesulitan dalam penentuan sasaran penerima program Samisake. Pemerintah Kecamatan tidak mempunyai basic data yang valid penduduk miskin yang berdasarkan *by name by adres*. Diserahkannya urusan penentuan sasaran dari Pemerintah Provinsi ke pemerintah Daerah tersebut ternyata berdampak pada capaian dari pelaksanaan program Samisake yang masih belum tepat sasaran. Hingga tahun 2013, berdasarkan data MDG's menyebutkan bahwa angka kemiskinan khususnya di Kota Jambi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah tanda Tanya besar manakala pada tahun-tahun tersebut Samisake dalam proses pelaksanaan. Temuan mendasar yang harus dicermati adalah proses perencanaan penentuan sasaran yang masih belum terintegrasi antara provinsi hingga desa serta proses penentuan sasaran di Desa atau Kecamatan masih belum berdasarkan data yang valid. Hal ini menjadi sesuatu yang sederhana akan tetapi memiliki dampak besar terhadap keberhasilan dari pencapaian program Samisake di Kota Jambi.

Kesimpulan

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

Di dalam upaya mencapai tujuan dari pelaksanaan Program satu milyar satu kecamatan atau biasa disebut dengan Samisake, Pemerintah Provinsi Jambi telah menentukan sasaran dari obyek program Samisake. Sasaran tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Di dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi dibantu oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam menyediakan data penerima bantuan program Samisake. Data tersebut tentunya sudah berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.

Jika mengacu pada penetapan sasaran atau objek Program SAMISAKE di Kota Jambi dapat dilihat jelas melalui Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015. Pada tahap sasaran program SAMISAKE BAB II Pasal 3 pada ayat 1 menyebutkan bahwa sasaran yang menerima program SAMISAKE di Kota Jambi ialah kepala keluarga sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Tahun 2011 merupakan sasaran penerima Program SAMISAKE. Penentuan keluarga miskin mengacu pada data yang tersedia di daerah. Dengan begitu diharapkan penerima bantuan Samisake menjadi tepat sasaran dan tepat fungsi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa data yang kurang valid dari penerima bantuan, sehingga ke depan dibutuhkan kroscek kembali setiap tahunnya nama-nama kepala keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Penentuan penerima bantuan sangat krusial dalam mempengaruhi proses pelaksanaan program Samisake. Penentuan penerima bantuan menjadi poin penting mencapai tujuan dari program Samisake yaitu menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan pemerintah untuk lebih selektif dan obyektif dalam menentukan calon penerima bantuan sangatlah diperlukan agar penetapan tersebut dapat tepat sasaran dan tepat fungsi.

Daftar Pustaka

Conyers, Diana dan Hills, Peter. 1994. *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan Sons. New York

Dey, Ian 1993 *Qualitative Data Analysis*. Routledge Taylor & Francis Group, London and New York

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. Oxford University Press.

Islamy, M. Irfan, (2003). *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*.
Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya.
Malang.

Kunarjo.2002.*Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Penerbit
Universitas Indonesia. Jakarta.

Kuncoro,Moedrajat. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,
Strategi, dan Peluang*. Erlangga

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal,
kota dan kawasan*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba. Jakarta

Siagian, Sondang P. 2005. *Filsafat Admistrasi*, Jakarta : Gunung Agung

Todaro,Michael P.*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Ris Alih bahasa Haris
Munandar. Erlangga . Jakarta